

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

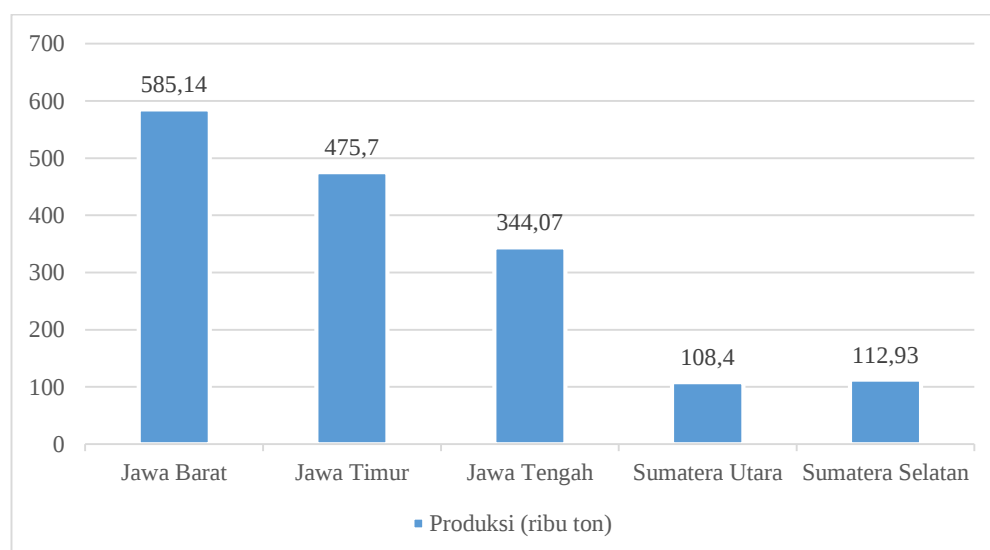
Isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah menjadi pendorong utama transisi global menuju sistem pertanian ramah lingkungan. Sektor pertanian konvensional berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, penurunan keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Sebagai respons, pertanian organik diakui sebagai salah satu solusi berbasis alam (nature-based solution) yang efektif untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pretty et al. (2018) secara empiris menunjukkan bahwa sistem pertanian organik dapat meningkatkan simpanan karbon tanah sebesar 26% dan mengurangi emisi nitrous oksida secara signifikan dibandingkan sistem konvensional. Menurut Rigby dan Cáceres (2021) transisi ke praktik pertanian berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan untuk menjaga daya dukung ekosistem global.

Di tingkat nasional, komitmen pemerintah Indonesia terhadap pertanian berkelanjutan telah diinternalisasi dalam berbagai kerangka kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2025 secara eksplisit menargetkan pengembangan pertanian organik sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah karbon dan ketahanan pangan. Komitmen operasional diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Organik, yang menjadi panduan hukum bagi pengembangan standar, sertifikasi, dan pembinaan. Standar teknisnya dirinci dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2020 tentang Sistem Pertanian Organik, yang mengatur seluruh aspek produksi, penanganan, dan pelabelan. Haryanto dan Suryanto (2022) menyatakan bahwa keberadaan Permentan dan SNI ini telah menciptakan landasan hukum yang lebih kuat dan lebih jelas dibandingkan regulasi sebelumnya, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi adopsi pertanian organik oleh petani.

Tuntutan kebijakan tersebut sejalan dengan dinamika pasar yang berkembang pesat. Tren konsumen global dan nasional semakin bergeser ke arah produk pangan

yang tidak hanya sehat dan aman, tetapi juga diproduksi secara beretika dan berkelanjutan. IFOAM Organics International (2023) mencatat bahwa pasar produk organik dunia telah menembus nilai USD 135 miliar dengan pertumbuhan tahunan yang konsisten. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (2023) melaporkan pertumbuhan rata-rata pangsa pasar produk organik sebesar 12-18% per tahun dalam lima tahun terakhir, didorong oleh peningkatan kesadaran kesehatan kelas menengah perkotaan dan ekspansi ritel modern. Sutanto et al. (2023) mengungkapkan bahwa preferensi konsumen beras terhadap atribut "organik bersertifikat" memiliki willingness to pay (kesediaan membayar) sangat tinggi, bahkan melebihi atribut rasa dan penampilan. Konvergensi antara tekanan lingkungan, dukungan kebijakan, dan tarikan pasar ini menciptakan momentum strategis untuk transformasi sistem pertanian.

Sebagai provinsi dengan sentra padi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memegang peran krusial dalam transformasi sistem pertanian nasional (Gambar 1). Potensi pengembangan pertanian organik di provinsi ini sangat besar, didukung oleh keanekaragaman agroekosistem, ketersediaan sumber daya lokal seperti pupuk kandang dari peternakan sapi perah, serta keberadaan pusat-pusat penelitian dan perguruan tinggi pertanian.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 1. 1 Lima Provinsi Sentra Padi Indonesia Tahun 2025

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (2023) mencatat luas lahan yang telah tersertifikasi organik mencapai 5.247 hektar, dengan komoditas unggulan antara lain padi, sayuran, dan kopi. Komitmen pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, yang menargetkan peningkatan luas areal dan jumlah petani organik secara bertahap. Namun, disrupsi iklim yang semakin nyata menjadi tantangan akut. Variabilitas curah hujan dan serangan hama penyakit di sentra padi Jawa Barat, seperti di Kabupaten Ciamis, meningkat selama dekade terakhir, yang berdampak pada fluktuasi produktivitas. Rachman (2024) menunjukkan bahwa praktik pertanian organik dengan perakaran yang lebih dalam dan kandungan bahan organik tanah yang tinggi, berpotensi meningkatkan ketahanan tanaman padi di Jawa Barat terhadap kekeringan dan banjir dibandingkan sistem konvensional. Dengan demikian, pengembangan padi organik di Jawa Barat, tidak hanya merupakan peluang ekonomi, tetapi juga menjadi strategi adaptasi iklim yang penting bagi ketahanan pangan provinsi.

Secara spesifik, Kabupaten Ciamis menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Komitmen ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang secara eksplisit mencantumkan pengembangan klaster pertanian organik sebagai program prioritas. Konteks inilah yang kemudian mengerucut pada potensi nyata di Kecamatan Panumbangan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lokasi panen raya padi organik di Kabupaten Ciamis, dengan beberapa desa yang aktif menerapkan metode pertanian ramah lingkungan System of Rice Intensification (SRI). Keberhasilan panen raya ini menunjukkan kelayakan budidaya padi organik tanpa pupuk kimia dan pestisida sintetis di daerah tersebut.

Sebagai wilayah agraris, Panumbangan memiliki keunggulan agroekosistem dengan topografi yang didominasi dataran hingga landai, curah hujan yang relatif merata sepanjang tahun, dan didukung oleh sistem irigasi dari Sungai Citanduy dan Sungai Parakansaat yang menjadi tulang punggung ketersediaan air. Ketersediaan

sumber daya lokal juga menjadi modal penting, dimana tradisi penggunaan pupuk kandang dari ternak sapi dan kambing masih dipertahankan oleh sekitar 30% petani lanjut usia, yang menunjukkan fondasi pengetahuan tradisional yang relevan untuk diolah lebih lanjut. Potensi kemandirian ini sejalan dengan Suryana dan Mulyani (2023) yang menyatakan bahwa petani di wilayah eks-Karesidenan Priangan Timur, termasuk Ciamis, memiliki modal sosial yang kuat untuk pengembangan sistem pertanian yang lebih mandiri berbasis kelompok tani.

Namun, kondisi ideal ini berhadapan dengan realita kompleks di lapangan. Data BPS Kabupaten Ciamis (2023) mengungkap bahwa ketergantungan pada input kimia masih sangat tinggi, dengan rata-rata konsumsi pupuk Urea di Kecamatan Panumbangan mencapai 350 kg per hektar per musim tanam, melebihi rekomendasi teknis. Praktik monokultur padi-padi yang intensif telah berlangsung selama beberapa dekade. Dampaknya mulai terlihat melalui indikasi degradasi lahan, dimana ditemukan lima titik di Panumbangan menunjukkan bahwa kandungan bahan organik tanah berada pada kisaran 1,2% - 2,1%, jauh di bawah ambang batas kritis (<3%) untuk mendukung produktivitas optimal (Arifin et al., 2021). Ketergantungan ini juga membebani ekonomi petani, di mana biaya pupuk dan pestisida kimia dapat menyedot hingga 35-40% dari total biaya produksi, sementara harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani cenderung fluktuatif dan rendah.

Tantangan spesifik pengembangan organik di tingkat akar rumput semakin kompleks. Sebagian besar petani tidak memahami secara utuh teknik pembuatan pupuk organik berkualitas tinggi atau formulasi pestisida nabati yang efektif. Kendala aksesibilitas terhadap input organik bersertifikat dan agen hayati juga nyata, di mana petani harus menempuh jarak lebih dari 25 km ke pusat kota untuk mendapatkannya. Di sisi hilir, rantai pemasaran yang tidak jelas menjadi penghalang utama. Produk padi non-sertifikat dari praktik semi-organik hanya dijual dengan harga yang sama dengan beras konvensional karena ketiadaan saluran pemasaran khusus dan sistem traceability. Hal ini diperparah oleh persepsi risiko yang tinggi di kalangan petani terhadap kemungkinan penurunan hasil dan serangan hama pada masa transisi, yang didasarkan pada pengalaman kegagalan beberapa petani pionir akibat kurangnya pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul: “Kelayakan Usaha Tani Padi Organik Di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berapa besarnya biaya, penerimaan, pendapatan usaha tani padi organik di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis?
2. Apakah usahatani padi organik di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis layak untuk diusahakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Besarnya biaya, penerimaan, pendapatan usahatani padi organik di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
2. Kelayakan usahatani padi organik di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuannya, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
2. Bagi petani, sebagai informasi untuk mengembangkan usahatani padi organik.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan terkait pengembangan kelayakan usahatani padi organik di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
4. Bagi peneliti lain selanjutnya sebagai bahan referensi yang terkait dengan usahatani padi organik.